

Judul : Tahan serbuan impor, BAM DPR Harap petani dilindungi
Tanggal : Kamis, 24 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tahan Serbuan Impor BAM DPR Harap Petani Dilindungi

FOTO: DPR.CO.ID



Adian Napitupulu

WAKIL Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu mendesak negara mengambil langkah konkret melindungi hasil pertanian lokal. Keberpihakan ini agar komoditas seperti tembakau dan bawang putih milik petani lokal tidak kalah diserbu produk impor.

Adian mengingatkan, sektor pertembakauan menopang mata rantai ekonomi yang amat luas sekaligus jadi sandaran hidup bagi jutaan warga. Karena itu, DPR meninjau kembali seluruh regulasi terkait kesehatan, rantai distribusi, hingga skema perdagangan luar negeri. "Itu untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan para petani domestik," tegasnya, Selasa (22/9/2026).

Selanjutnya, upaya perlindungan komoditas nasional mesti diimbangi promosi agresif di pasar internasional melalui perwakilan diplomatik Indonesia. Kedutaan besar di luar negeri diminta bertugas aktif mengenalkan keunggulan tembakau, rokok, serta seluruh kekayaan alam Indonesia.

Strategi negara lain dalam memasarkan produk unggulannya, sambungannya, patut dijadikan rujukan berharga bagi penataan perdagangan nasional. Keunggulan tembakau maupun bawang putih

lokal perlu diperkenalkan lebih gencar ke ranah global. "Agar iklim niaga tidak sekadar membuka pasar impor, melainkan memperkuat daya saing petani," tegasnya.

Senada, anggota BAM DPR Siti Mukaromah menyoroti kehadiran negara lewat regulasi yang berpihak penuh kepada nasib para petani tembakau dan bawang putih. Keterpaduan kebijakan lintas sektor, mencakup pertanian, perdagangan, serta industri, wajib berjalan serasi demi memastikan setiap komoditas daerah sanggup mendatangkan kemakmuran bagi pembudidaya.

Dia bilang, tingginya kuota impor bawang putih dari luar negeri terus menekan perekonomian daerah seperti di Temanggung, Jawa Tengah, yang pernah berjaya sebagai pusat produksi lokal. Kebijakan impor yang terlalu bebas dan tak terkendali jelas merugikan masyarakat tani serta merusak potensi swasembada di kawasan itu.

Karena itu, Pemerintah wajib melakukan intervensi saat harga komoditas anjlok sewaktu musim panen tiba. Langkah konkret yang bisa diambil adalah melalui optimalisasi industri pengolahan serta diversifikasi hasil panen mentah jadi barang turunan bernilai tambah tinggi, didukung kreativitas dan sinergi bersama pejabat di daerah.

Pasalnya, permasalahan kompleks yang dihadapi para petani kerap menyentuh ranah kewenangan kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi maupun harmonisasi aturan yang solid. "Sektor perdagangan, industri, serta pertanian memiliki keterkaitan erat, walaupun pembahasan resminya di DPR periode ini tersebar pada komisi-komisi yang berbeda," jelasnya. ■ PVB